

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Acmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2011.
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Aziz Syamsuddi, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang, Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-5, CV Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Backy Krisnayuda, *Pancasila & Undang-Undang; Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, terjemahan SPA Teamwork*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
- C.F Strong, *Konstitusi-konstitusi politik modern: kajian tentang sejarah dan bentuk-bentuk konstitusi dunia*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- CST Kansil, Christine ST Kansil, *pengantar ilmu hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- Dendi Sugiono, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.
- Diky, dkk, *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2022.
- Ftakhurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang, 2012.

- Imam Hidajat, *Teori-Teori Politik Revisi*, Setara Press, Malang, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta Pusat, 2006.
- Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan 1*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, ed. Muhammad Riyadh and Ryan Pradana, 1st ed, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, Jakarta, 1983.
- M. Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005.
- Muhammad Yasin dkk, *"Anotasi Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa"*, Pusat Telaah dan Informasi Regional PATTIRO, Jakarta, 2015.
- Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, 1st ed, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017.

- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi*, Setara Press, Malang, 2015.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Nurul Qamar, *Hak asasi manusia dalam Negara hukum demokrasi*, sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*. Cetakan Ke-7, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Rahman Yasir, *Gagasan Islam Tentang Demokrasi*, AKA Groups, Yogyakarta, 2006.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Rudy, *Konstitusionalisme Indonesia: Buku I Dasar dan Teori*. PKKPUU Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2013.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum Cetakan Ke-7*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014.
- Sunarno. *Membedah Demokrasi, Sejarah Konsep dan Implementasinta di Indonesia*. UNY Press, Yogyakarta, 2015.
- Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962.
- Wijaya A.W, "*Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa menurut UU Nomor 5 tahun 1979*" (*sebuah tinjauan*), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

2. Jurnal

- Bachtiar, "Esensi Paham Konsep Konstitualisme dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan" *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No. 1, 2015. DOI: <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v6i1.342>
- Indah Sari, "Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern" *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara

- Marsekal Suryadarma, Vol. 9 No. 1, 2020.
<https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.297>
- Jannus Timbo Halomoan Siahaan, Bertha Nellya, Matius Bangun, “Presiden Indonesia Tiga Periode”, *Jurnal Darma Agung*, Vol. 29. No. 2, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v29i2.1081>
- Lihat, Riza Multazam Luthfy, “Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi” *Jurnal Hukum*, Vol. 48, No. 4, 2019. [10.14710/mmh.48.4.2019.319-330](https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.319-330)
- Marwan Maas, Menggagas Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal Hukum Prior's*, Vol. 3 No. 1, (2019). DOI:[10.25105/prio.v3i1.356](https://doi.org/10.25105/prio.v3i1.356)
- M. Agus Santoso, “Perkembangan Konstitusi di Indonesia,” *Yustisi*, Vol. 2 No. 3, 2018. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>
- M. Yasin Al-Arif, Aktualisasi Paham Konstitusionalisme dalam Konstitusi Pasca Amandemen Undang Undang Dasar 1945, *Pandecta*, Vol. 12 No. 2, 2017. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v12i2.9926>
- Saleng, A, Penegakan Hukum dalam Era Reformasi. *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 11, No. 25, 2004. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss25.art12>
- Usman, “Islam dan Politik; Telaah atas Pemikiran Politik Kontemporer di Indonesia”, *aldaulah Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan* 6, No 1, 2017. DOI: <https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4867>
- Warsudin, D., & Hamid, H, Kajian Teoritis terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 10(1), 2023. <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i1.2023.%25p>

3. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2015; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 43/PUU-XIX/2021 tentang Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa

4. Internet/Website

Despan Heryansyah “*Analisis Pemerintahan Desa Legislatif Desa*” <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/04/22/legislatif-desas>. Diakses pada 20 Mei 2024.

Iskandar, A. M. “Ketua DPR Dukung Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa.” REPUBLIKA.CO.ID, 2022. <https://news.republika.co.id/berita/rll1te396/ketua-dpr-dukung-perubahan-masa-jabatan-kepala-desas>. Diakses pada 3 Januari 2024

Laman Resmi Dewan Perwakilan Rakyat, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49059/t/Tok!%20DPR%20Remi%20Sahkan%20RUU%20Desa%20Menjadi%20UU>, Diakses pada 22 Mei 2024.

Laman Resmi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia <https://www.mpr.go.id/berita/Terima-Pengurus-Asosiasi-Kepala-Desa-Nasional-%28AKSI%29,-Ketua-MPR-RI-Dorong-Revisi-Undang-Undang-Desa-Segera-Disahkan>. Diakses pada 21 Mei 2024.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) “*Menjelang Pemilu, UU Desa Direvisi*” <https://www.kppod.org/berita/view?id=1215>. Diakses pada 11 Juli 2024.

Prayogi D.S. “*Perpanjangan Masa Jabatan Kades Sarat Kepentingan Politik*” <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/23/perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desasarat-kepentingan-politik>. Diakses pada 21 Mei 2024.

Solichah, Z. “*Perpanjangan Masa Jabatan Kades Rawan Tindakan Korupsi*.” [jatim.antaranews.com, 2023. https://jatim.antaranews.com/berita/674301/pakar-hukum-unej-sebutperpanjanganmasajabatan-kadesrawantindakan-korupsi](https://jatim.antaranews.com/berita/674301/pakar-hukum-unej-sebutperpanjanganmasajabatan-kadesrawantindakan-korupsi). Diakses pada 3 Januari 2024.